



Margareta Harice Dua
 Lorang¹
 Walter Obon²
 Margaretha Yulianti³

PERAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIKKA

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka. Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Sikka ada Aspek geografis dan demografis, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek daya saing daerah, dan Aspek Pelayanan umum. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kegiatan. Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa peran badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka.

Kata Kunci: BAPELITBANG, Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstract

This article aims to find out the role of the Research and Development Planning Agency (Bapelitbang) in development planning in Sikka Regency. Sikka Regency's regional development problems include geographic and demographic aspects, community welfare aspects, regional competitiveness aspects, and Aspects of public services. This work internship activity was carried out at the office of the Sikka Regency Planning, Research and Development Agency in the field of planning, control and evaluation of regional development. The research method used is the activity method. Data collected through interviews and analyzed qualitatively. The results of this research showed that the role of the research and development planning agency (Bapelitbang) in development planning in Sikka Regency.

Keyword: BAPELITBANG, Regional Development Planning

PENDAHULUAN

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan yaitu mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, dan mengikuti proses pembelajaran didalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran diluar program studi (Permendikbud, 2020).

Kampus merdeka adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda atau mahasiswa untuk berkarir dimasa depan dengan memberikan kesempatan untuk mengasah dan menggali minat dan bakat mereka serta mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintahan Kabupaten Sikka yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan penelitian dan pengembangan. Bapelitbang Kabupaten Sikka menjalankan fungsinya untuk melakukan

^{1,2,3}) Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa
 email: margaretharice55@gmail.com

perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyusun perencanaan kebijakan anggaran daerah, mengkoordinasi, mengendalikan, memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Program magang periode ini dikasih kepercayaan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dimana bidang tersebut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan informasi pembangunan daerah. Tapi Salah satu masalah yang sering dihadapi di Bidang PPED yaitu perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Sikka.

Pembangunan daerah ialah sebuah proses dimana pemerintahan daerah bersama dengan sektor swasta dengan tujuan membangun lapangan pekerjaan baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Fakhri (2001:10) menyatakan bahwa pembangunan merupakan kata benda netral dimana makna yang terkandung ialah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu proses serta usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya serta infrastruktur masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*Gap Expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan- permasalahan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

Tabel 1. Permasalahan pembangunan

1.	Aspek geografis dan demografis	1. Permasalahan pembangunan dari aspek geografis, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Rendahnya kesesuaian tata ruang wilayah b. Belum optimalnya pelaksanaan tata ruang c. Belum ditetapkannya perda RTRW dan Perbub RRTR d. Belum optimalnya perencanaan tata ruang 2. Permasalahan pembangunan dari aspek Demografi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya presentase kepemilikan kartu identitas anak b. Masih rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. c. Belum Terdata Penduduk non permanen di Kabupaten Sikka. d. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2.	Aspek kesejahteraan masyarakat	Permasalahan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB perkapit kabupaten Sikka yang masih rendah 2. Pengeluaran perkapita masyarakat yang masih rendah 3. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi 4. Pertumbuhan ekonomi yang melambat 5. Laju inflasi yang tidak stabil
3.	Aspek daya saing daerah	Permasalahan pembangunan pada aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya indeks pembangunan manusia 2. Masih rendahnya usia harapan hidup 3. Masih adanya angka harapan lama sekolah 4. Rata- rata lama sekolah masih rendah 5. Masih tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita
4.	Aspek pelayanan Umum	Permasalahan pembangunan dari aspek pelayanan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

		<p>Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang dengan pelayanan dasar terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan pendidikan b. Urusan kesehatan c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang d. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman <p>2. urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</p> <p>Permasalahan pembangunan pada pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan tenaga kerja b. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak c. Urusan pangan d. Urusan petanahan <p>3. Urusan pemerintahan pilihan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan pariwisata b. Urusan pertanian c. Urusan perikanan d. Urusan perdagangan <p>4. Urusan penunjang pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan perencanaan b. Urusan keuangan c. Urusan pengawasan\
--	--	--

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan fungsi Bapelitbang serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Sikka.

Tujuan dari laporan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka.

METODE

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja dijalankan selama kurang lebih empat bulan terhitung dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai tanggal 23 Desember 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kegiatan. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek geografis dan demografis

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi umumnya diiringi dengan peningkatan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk dapat memberikan gambaran dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayahnya. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah perlu mengidentifikasi aspek yang menjadi fokus pada rencana pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Sikka. Kondisi fisik wilayah dan topografi kawasan Kabupaten Sikka tentunya memiliki potensi tersendiri pada sektor ekonomi, namun pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Sikka masih tertinggal. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi tentunya menjadi salah satu upaya yang dapat

dilakukan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Sikka.

Aspek kesejahteraan masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus selaras dengan potensi dan peluang pengembangan, dan sejalan dengan prioritas yang telah digariskan oleh peraturan yang berlaku pada masing-masing wilayah. Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas, kualitas petani, dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumberdaya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Sebagai akibatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Kabupaten Sikka, khususnya petani masih sangat rendah tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan .

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan pertanian dan daerah perdesaan secara umum. Dalam upaya mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah, RPJMD 2023 telah menggariskan bahwa sasaran pembangunan yang dilakukan adalah meningkatkan peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, meningkatkan pembangunan pada daerah -daerah terbelakang dan tertinggal, meningkatkan perkembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah, serta meningkatkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan di kota dan desa dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah..

Aspek daya saing daerah

Hasil pengumpulan dan pengolahan data menunjukkan bahwa peningkatan daya saing di Kabupaten Sikka telah direncanakan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2023. Perencanaan peningkatan daya saing daerah tersebut dituangkan dalam empat misi pembangunan yakni Pertama, mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing. Langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah melalui perbaikan iklim investasi, menumbuhkembangkan perekonomian rakyat yakni bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta mengembangkan dan meningkatkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kedua, daya saing daerah ditingkatkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dari data tersebut maka sesungguhnya upaya untuk meningkatkan daya saing daerah telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sika, namun demikian upaya tersebut belum mencapai hasil yang optimal yang dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Usaha peningkatan daya saing daerah yang dilakukan pemerintah. menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan adalah belum adanya standar minimal yang jelas tentang proses penyusunan rencana pembangunan.

Standar kualifikasi pegawai ini penting karena kemampuan untuk mengkritisi usulan rencana pembangunan serta memberikan arahan yang tepat atas program yang diajukan akan berdampak positif bagi pembangunan daerah bukan hanya pada jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Hal lainnya berkaitan dengan standar yang digunakan dalam memonitoring dan mengevaluasi serta menyusun rencana pembangunan. Evaluasi yang dilakukan atas program pembangunan yang dilaksanakan lebih pada besaran penyerapan anggaran dan output yang berupa data-data kuantitatif serta mengabaikan outcome yang bersifat kualitatif sehingga evaluasi atas efektivitas program tidak optimal.

Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan. Untuk itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintan, keadilan, dan kekhlasan suatu daerah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka berupaya menyelenggarakan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance), transparan, akuntabel dan berorientasi kepada Akuntabilitas, yang merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. dan diandalkan.

Dalam hal pembangunan daerah, Bidang Perencanaan Pengendalian evaluasi Daerah (PPED) memiliki peranan yang cukup penting guna menyukseskan pembangunan di wilayah Kabupaten Sikka baik untuk kurun waktu jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Tetapi, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menyongkong pembangunan daerah di Kabupaten sikka yang diakibatkan karena keterbatasan anggaran biaya dan juga terdapat beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan akses sehingga pembangunan daerah memiliki kendala yang sangat berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2002). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE. Yogyakarta
- Al Ma'shum, N. H. H., & Soemitra, A. (2022). Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappeda Su) Terhadap Pembangunan Daerah Di Wilayah Sumatera Utara. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3396-3400.
- Garcia, M. S. M., Wisang, I. V., & Nuwa, C. A. W. (2023). Pengaruh budaya organisasi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Bapelitbang Kabupaten Sikka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4992-5000.
- Keputusan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Bapelitbang RI.
- Lebi, M. S., Wellem, I., & Yulianti, M. (2023). Pengaruh kerjasama tim dan pengawasan terhadap kinerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 133-145.
- Mongshi, M. S. W., Luju, E., Aurelia, P. N., & Muda, V. A. (2023). Peran Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Peningkatan Kualitas Paud Melalui Program Holistik-Integratif. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2661-2667.
- Natalia Melantika, Imanuel Wellem, & Walter Obon. (2023). Analisis Kinerja Organisasi Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Kantor Desa Wolomotong Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(2), 18–36.
- Putri, Y. (2022). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Labuhanbatu. *Jasmien*, 3(01), 484-491.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritah Daerah.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Yanti, T. N., Rengga, A., & Yulianti, M. (2022). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Tahun Anggaran 2017-2021 (Studi Kasus Desa Seu Sina Kecamatan Kewapante) (Doctoral dissertation, Universitas Nusa Nipa).
- Yuliana Ngole, Walter Obon, & Yustina Olivia Da Silva. (2023). Pengaruh Etos Kerja Dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(4), 227–238.